

BAB III

OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Pada penelitian ini yang menjadi objek penelitiannya adalah Kemandirian Keuangan Daerah, Efektifitas Pendapatan Asli Daerah dan Alokasi Belanja Modal. Periode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 10 (sepuluh) tahun terbilang dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2017. Dengan subjek yang diteliti adalah 6 daerah Kabupaten/Kota di Priangan Timur.

3.1.1 Sejarah Kota Tasikmalaya

Sejarah berdirinya Kota Tasikmalaya sebagai daerah otonomi tidak lepas dari sejarah berdirinya Kabupaten Tasikmalaya sebagai daerah kabupaten induknya. Sebelumnya, kota ini merupakan ibu kota dari Kabupaten Tasikmalaya, kemudian meningat statusnya menjadi kota administratif tahun 1978, pada waktu A. Bunyamin menjabat sebagai Bupati Tasikmalaya, dan kemudian menjadi pemerintah kota yang mandiri pada masa Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya di pimpin oleh bupatinya saat itu H. Suljana W.H.

Sang Mutiara dari Priangan Timur itulah julukan bagi Kota Tasikmalaya. Kota Tasikmalaya adalah salah satu kota di Provinsi Jawa Barat. Kota ini terletak pada 108° 08' 38" - 108° 24' 02" BT dan 7° 10' - 7° 26' 32"LS dibagian Tenggara Wilayah Provinsi Jawa Barat. Kota ini dahulu adalah sebuah kabupaten, namu seiring dengan

perkembangan, maka terbentuklah 2 bentuk pemerintahan yaitu Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dan Pemerintahan Kota Tasikmalaya.

Tonggak sejarah lahirnya Kota Tasikmalaya, mulai digulirkan ketika Kabupaten Tasikmalaya dipimpin oleh A. Bunyamin, Bupati Tasikmalaya periode tahun 1976-1981. Pada saat itu melalui Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1976 diresmikan Kota Administrasi Tasikmalaya oleh Menteri Dalam Negeri yang waktu itu dijabat oleh H. Amir Machmud. Walikota Administratif pertama adalah Drs. H. Oman Roosman, yang dilantik oleh Gubernur Jawa Barat H. Aang Kunaefi.

Pada awal pembentukannya, wilayah kota Administratif Tasikmalaya meliputi 3 Kecamatan yaitu Cipedes, Cihideung, dan Tawang dengan jumlah desa sebanyak 13 desa. Kemudian pada tahun 2001, dirintislah pembentukan Kota Tasikmalaya oleh Bupati Tasikmalaya, Kol. Inf. H. Suljana Wirata Hadisubrata (1996 – 2001) dengan membentuk sebuah Tim Sukses Pembentukan Pemerintahan Kota Tasikmalaya yang diketuai oleh H. Yeng Ds. Pertawisnata SH. Melalui proses panjang akhirnya akhirnya dibawah pimpinan Bupati Drs. Tatang Farhanul Hakim, pada tanggal 17 Oktober 2001 Melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001. Pembentukan Pemerintah Kota Tasikmalaya sebagai pemerintah daerah otonom ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri atas Nama Presiden RI di Jakarta bersama-sama dengan Kota Lhoksumawe, Langsa, Padangsidempuan, Prabumulih, Lubuk Lingau, Pager Alam, Tanjung Pinang, Cimahi, Batu, Sikawang dan Bau-bau. Selanjutnya pada tanggal 18 Oktober 2001 pelantikan

Drs Wahyu Suradhiharja sebagai pejabat Walikota Tasikmalaya oleh Gubernur Jawa Barat dilaksanakan di Gedung Sate Bandung.

Melalui Surat Keputusan No 133 Tahun 2001, tanggal 13 Desember 2001 Komisi Pemilihan Umum membentuk Panitia Pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Tasikmalaya (PPK-DPRD), selanjutnya Pengangkatan Anggota DPRD Kota Tasikmalaya disahkan melalui Keputusan Gubernur Jawa Barat No.171/Kep.380/Dekon/2002, tanggal 26 April 2002, dan pada tanggal 30 April 2002 keanggotaan DPRD Kota Tasikmalaya pertama diresmikan. Kemudian Pada tanggal 14 November 2002, Drs. H. Bunyamin dilantik sebagai Walikota Tasikmalaya, sebagai hasil dari tahapan proses pemilihan yang dilaksanakan oleh legislatif.

Sesuai Undang-Undang No 10 Tahun 2001 bahwa wilayah Kota Tasikmalaya terdiri dari 8 Kecamatan dengan jumlah Kelurahan sebanyak 15 dan Desa sebanyak 54, tetapi dalam perjalanannya melalui Perda No. 30 Tahun 2003 tentang perubahan status Desa menjadi Kelurahan, desa-desa dilingkukan Pemerintah Kota Tasikmalaya berubah statusnya menjadi Kelurahan, oleh karena itu maka jumlah kelurahan menjadi 69 kelurahan, sedangkan kedelapan kecamatan tersebut antara lain: Kecamatan Tawang, Kecamatan Cihideung, Kecamatan Cipedes, Kecamatan Indihiang, Kecamatan Kawalu, Kecamatan Cibereum, Kecamatan Mangkubumi, Kecamatan Tamansari. Berikut ini urutan pemegang jabatan Walikota Tasikmalaya dari terbentuknya kota administrative sampai menjelang terbentuknya Kota Tasikmalaya:

Tabel 3.1
Jabatan Walikotatif Tasikmlaya

Pejabat	Tahun Jabatan
Oman Roesman	1976-1985
Yeng Pertawinata	1985-1989
R. Y. Wahyu	1989-1992
Erdhi Hardiana	1992-1999
Bubun Bunyamin	1999-2007
Drs. H. Syarif Hidayat, M.Si	2007-2012
Drs. H. Budi Budiman	2012-2017

Sumber: Pemerintah Kota Tasikmalaya
(dalam www.portal.tasikmalayakota.go.id)

3.1.2 Sejarah Kabupaten Tasikmalaya

Kabupaten Tasikmalaya mempunyai luas wilayah sebesar 2.708,81 km² atau 270.881 ha, secara administratif terdiri dari 39 Kecamatan, 351 desa. Tiga kecamatan merupakan kecamatan yang mempunyai wilayah pesisir dan lautan yaitu Kecamatan Cikalong, Cipatujah dan Karangnunggal, dengan panjang garis pantai 56 km. Wilayah Kabupaten Tasikmalaya memiliki ketinggian berkisar antara 0 – 2.500 meter diatas permukaan laut (dpl). Secara umum wilayah tersebut dapat dibedakan menurut ketinggiannya, yaitu : bagian Utara merupakan wilayah dataran tinggi dan bagian Selatan merupakan wilayah dataran rendah dengan ketinggian berkisar antara 0 – 100 meter dpl.

Kondisi kemiringan lahan di Kabupaten Tasikmalaya berturut-turut yaitu: Sangat Curam (> 40 %) sebesar 1,39 % dari luas Kabupaten Tasikmalaya, Agak Curam (15 % - 40 %) sebesar 25,35 %, Curam (5 % - 15 %) sebesar 27,11 %, Landai (2 % - 5 %) sebesar 13,27 %, dan Datar (0 % - 2 %) sebesar 32,87 % dari luas Kabupaten Tasikmalaya. Dari data kemiringan lahan terlihat bahwa sebagian besar bentang alam Kabupaten Tasikmalaya didominasi oleh bentuk permukaan datar sampai dengan agak curam, dengan kondisi kemiringan lahan tersebut kurang menguntungkan untuk pengembangan prasarana dan sarana wilayah.

Kondisi hidrologi di wilayah Kabupaten Tasikmalaya terdiri dari Daerah Aliran sungai-besar dan sungai kecil yang merupakan bagian dari sistem drainase yang dipengaruhi oleh kondisi topografi dan struktur fisiografinya di Kabupaten Tasikmalaya terdapat 6 daerah aliran sungai besar atau sungai utama, yaitu Sungai Cilangla, Cimedang, Cisanggiri, Cipatujah, Citanduy, dan Sungai Ciwulan. Pola aliran daerah aliran sungai umumnya berpola radial, karena lebih dipengaruhi dominansi vulkanik. Pada daerah tektonik pola aliran berubah menjadi tidak teratur (irregular), tergantung pada bentuk dan arah proses tektonik yang terjadi.

Kondisi perekonomian makro Kabupaten Tasikmalaya mengalami pertumbuhan pada kurun waktu tahun 2006-2009, hal ini ditunjukkan dengan peningkatan LPE sebesar 4,01% pada tahun 2006 menjadi 4,13% pada tahun 2009. Menurut Bank Indonesia (2007), peningkatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tasikmalaya tersebut didukung oleh stabilitas ekonomi nasional yang tetap terjaga dan

bersumber dari meningkatnya perdagangan luar negeri, konsumsi dan bertambahnya kegiatan investasi.

Hal yang juga mendukung peningkatan LPE adalah terkendalinya laju inflasi. Inflasi pada tahun 2009 tercatat sebesar 4,17%, turun dari 12,07% pada tahun 2008. Angka inflasi ini merupakan inflasi Kota Tasikmalaya yang merupakan rujukan dari inflasi di Daerah Priangan Timur. Inflasi yang tinggi pada tahun 2008 disebabkan oleh kenaikan harga sektor pangan.

Sektor pertanian sebagai sektor penyedia lapangan kerja Kabupaten Tasikmalaya terbesar, yaitu sekitar 43,22% kesempatan kerja berasal dari sektor pertanian, diikuti perdagangan 24,75 %, dan jasa-jasa 11,08 %. Sektor pertanian merupakan penyedia utama kebutuhan pangan masyarakat yang merupakan kebutuhan dasar dan hak asasi manusia. Sektor pertanian juga menyediakan pasar yang sangat besar untuk produk manufaktur karena jumlah penduduk perdesaan yang besar dan terus mengalami peningkatan. Dengan demikian, sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang paling efektif untuk mengentaskan kemiskinan di wilayah perdesaan melalui peningkatan pendapatan mereka yang bekerja di sektor pertanian. Komoditas unggulan sektor pertanian Kabupaten Tasikmalaya yang sudah berorientasi ekspor antara lain: Padi Organik (SRI) dengan sentra di 7 (tujuh) Kecamatan. (Sukaresik, Cisayong, Sukaraja, Manonjaya, Cineam, Sukahening dan Salawu), Manggis dengan sentra di Puspahiang, Mendong dan Golok Galonggong Manonjaya. Sedangkan pada

sektor industri adalah kerajinan dengan sentra di Rajapolah dan bordir dengan sentra di Sukaraja.

Visi Pembangunan Kabupaten Tasikmalaya tahun 2005-2025 adalah:

"Kabupaten Tasikmalaya Yang Religius/Islami, Maju dan Sejahtera Tahun 2025".

Misi Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya yaitu:

- Mewujudkan masyarakat yang beriman, bertaqwa, berkualitas dan mandiri
- Mewujudkan perekonomian yang tangguh berbasis keunggulan agribisnis
- Mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance)
- Mewujudkan Infrastruktur Wilayah yang Lebih Merata Dengan
- Memperhatikan Aspek Lingkungan yang Asri dan Lestari

3.1.3 Kabupaten Ciamis

Sejak otonomi daerah diberlakukan pada tahun 2001, Kabupaten Ciamis mengalami pemekaran wilayah menjadi Kabupaten Ciamis dengan 30 kecamatan dan Kota Banjar 4 kecamatan. Seiring dengan peningkatan jumlah penduduk di Kabupaten Ciamis dan untuk mengurangi rentang kendali pemerintahan pada tahun 2006 di Kabupaten Ciamis mengalami pemekaran sebanyak 6 kecamatan, sehingga dari 30 kecamatan menjadi 36 kecamatan. Begitu juga untuk jumlah desa, selama periode 2007 – 2009, jumlah desa bertambah sebanyak 3 desa. Demikian juga untuk periode yang sama jumlah Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) mengalami penambahan sebanyak 27 Rukun Warga (RW) dan 92 Rukun Tetangga (RT).

Jumlah PNS di Ciamis mengalami peningkatan dari 18.404 orang pada tahun 2008 menjadi 18.966 orang pada tahun 2009 Berdasarkan komposisi pegawai menurut jenis kelamin, selama tahun 2007 - 2009 rata-rata jumlah pegawai laki-laki meningkat sebesar 1,37 persen sedangkan pegawai perempuan sebesar 6,47 persen.

Selanjutnya data yang ada juga menunjukkan adanya penurunan kualitas PNS dari sisi pendidikan yaitu semakin banyaknya jumlah pegawai yang berpendidikan SMA ke bawah, sementara jumlah pegawai yang berpendidikan tinggi (Diploma ke atas) semakin berkurang, hal ini disebabkan adanya pengangkatan pegawai honorer yang bekerja dipemerintah daerah Kabupaten Ciamis dengan tingkat pendidikan yang rata-rata memiliki pendidikan di bawah SMA.

Peta perpolitikan Kabupaten Ciamis hasil Pemilihan Umum (PEMILU) Tahun 2009 menunjukkan dominasi PDI-P di parlemen (DPRD) yang diikuti oleh Demokrat dan Golkar. Jumlah anggota DPRD yang berasal dari PDI-P sebanyak 11 orang lebih dari seperlima dari total anggota DPRD Ciamis. Jumlah terbanyak kedua dan ketiga ditempati Partai Demokrat dan Partai Golkar dengan jumlah perolehan kursi masing-masing sebanyak 9 dan 8. Partai Demokrat merupakan partai politik yang fenomenal, apabila dibandingkan dengan PEMILU sebelumnya partai politik ini secara perlahan dan pasti mengalami lonjakan jumlah perolehan kursi di Parlemen (DPRD) Kabupaten Ciamis di mana pada PEMILU tahun 2004 hanya menempatkan 1 kursi (2,22 %) sedangkan pada tahun 2009 melonjak menjadi 9 kursi (18,00 %), dan yang paling

mengejutkan yaitu perolehan kursi untuk Partai GOLKAR dimana pada PEMILU sebelumnya memperoleh 14 kursi (31,11 %) berkurang menjadi 8 kursi (16,00 %).

Untuk membiayai pembangunan, pemerintah di Kabupaten Ciamis pada tahun 2009 menghabiskan anggaran hampir 1,348 triliun rupiah seperti yang tercatat pada realisasi APBD Kabupaten Ciamis. Jumlah ini meningkat sebesar 15,91 persen dari APBD pada 2007. Dari total APBD Kabupaten Ciamis sebesar 1,348 triliun, PAD hanya menyumbang sebesar 0,051 triliun atau sekitar 3,84%, sementara DAU menyumbang sekitar 1,05 triliun rupiah atau sekitar 63,81%, dengan demikian pembiayaan kegiatan pembangunan di Kabupaten Ciamis masih tergantung dari DAU.

Berdasarkan hasil analisis terhadap kondisi objektif dan potensi yang dimiliki dengan mempertimbangkan kesinambungan pembangunan sesuai dengan tahapan pembangunan jangka panjang daerah, maka Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2009-2014 adalah sebagai berikut:

“Dengan Iman dan Taqwa Ciamis MANTAP Sejahtera Tahun 2014”.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut diatas, maka misi pembangunan daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2009-2014 ditetapkan sebagai berikut:

- Meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan pengamalan agama sesuai dengan tuntunan Allah dan Utusan-Nya.
- Meningkatkan sumber daya yang berakhlak mulia, amanah, produktif dan berdaya saing.
- Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

- Mewujudkan perekonomian daerah dan masyarakat yang tangguh dan berdaya saing berbasis potensi unggulan local.
- Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan desa.
- Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup guna mendukung pembangunan berkelanjutan.
- Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur wilayah dan perdesaan.

3.1.4 Kota Banjar

Kota Banjar adalah salah satu kota yang berada di Provinsi Jawa Barat dengan ketinggian antara 20 sampai dengan 500 meter di atas permukaan laut serta beriklim tropis dan menjadi salah satu kawasan andalan (yaitu kawasan yang mampu berperan mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan tersebut dan kawasan sekitarnya). Tingkat kesuburan tanah Kota Banjar pada umumnya tergolong sedang (baik) dengan tekstur tanah sebagian besar halus dengan jenis tanah alufial kecuali Kecamatan Langensari selain memiliki jenis tanah alufial juga berjenis tanah podsonik merah kuning meski tidak mempengaruhi tingkat kesuburannya. Sejak diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 21 Februari 2002 Kota Banjar sudah berjalan 3 tahun. Dalam perkembangannya Kota Banjar merupakan jalur lalu lintas penghubung antara Propinsi Jawa Barat – Jawa Tengah – Jawa Timur sehingga diharapkan mampu tumbuh sebagai kota industri, perdagangan, jasa dan pariwisata bagi Wilayah Jawa Barat bagian Timur. Luas Wilayah Kota Banjar sebesar 13.197,23 Ha, terletak diantara $07^{\circ} 19' \text{ } \phi$ - $07^{\circ} 26' \text{ } \phi$ Lintang Selatan dan $108^{\circ} 26' \text{ } \phi$ - $108^{\circ} 40' \text{ } \phi$ Bujur Timur.

Berdasarkan undang-undang nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat kurang lebih 113,49 Km² atau 11.349 Ha. Kota Banjar mempunyai batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara , berbatasan dengan Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis serta Kecamatan Dayeuhluhur;
- Sebelah Timur , berbatasan dengan Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis dan kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah;
- Sebelah Selatan , berbatasan dengan Kecamatan Lakbok dan Kecamatan Pamarican kabupaten Ciamis;
- Sebelah Barat , berbatasan dengan Kecamatan Cimaragas dan Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis.

Jumlah Penduduk Kota Banjar menurut data dari Dinas Capilduk & KB pada tahun 2004 tercatat sebanyak 160.810 jiwa dengan rincian 79.115 jiwa penduduk berjenis kelamin laki-laki dan sebanyak 81.695 jiwa berjenis kelamin perempuan. Dalam perkembangannya penduduk Kota Banjar dari tahun 2003 sampai tahun 2004, maka akan didapat angka Pertumbuhan Penduduk Kota Banjar sebesar 0,12 persen lebih rendah dibanding pertumbuhan tahun sebelumnya yang mencapai 0,98 persen. Pertumbuhan penduduk secara umum ini dipacu dari pertumbuhan penduduk di beberapa Kecamatan.

Visi dan Misi Kota Banjar Visi: Terwujudnya Kemandirian Kota Banjar yang Berlandaskan Iman dan Taqwa Sebagai Pintu Gerbang Jawa Barat Tahun 2010 Misi:

- Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang beriman dan Bertaqwa;
- Meningkatkan Kesadaran Hukum dan Menegakan Supremasi Hukum;
- Menumbuhkan Kekuatan Ekonomi Masyarakat;
- Mewujudkan Pemerintahan yang Profesional Untuk Memberi Pelayanan Prima Kepada Masyarakat;
- Mengembangkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan;
- Mengelola Sumber Daya Alam (SDA) Berwawasan Lingkungan;
- Mengoptimalkan dan Membangun Sarana dan Prasarana Kota.

3.1.5 Kabupaten Garut

Sejak periode Kabupaten Limbangan baru yang beribukota di Suci sebagai cikal bakal Kabupaten Garut sampai dengan periode setelah muncul nama resmi “Kabupaten Garut”, terdapat 23 bupati yang pernah menjabat.

Seperti yang telah dijelaskan dalam halaman Sejarah Singkat Garut, pembentukan Kabupaten Limbangan-baru berdasarkan Surat Keputusan Raffles sebagai Letnan Gubernur (Lieutenant Governor) di Indonesia adalah tanggal 16 Februari 1813. Bupati yang menjabat pada saat itu adalah RAA Adiwijaya (1813-1831), karena itu jika perhitungan masa pemerintahan Kabupaten Garut berawal dari sini maka RAA Adiwijaya merupakan Bupati Garut yang pertama.

Sejak 1 Juli 1913 Kabupaten Limbangan diganti menjadi Kabupaten Garut yang terjadi pada masa pemerintahan periode ke-4 sejak 1813, yaitu masa Bupati RAA Wiratanudatar (1871-1915), berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jenderal tanggal 7 Mei 1913 (Staatsblad Van Nederlandsch-Indie No.356: Besluit van den Gouverneur-General van Nederlandsch-Indie van 7 Mei 1913 No. 60). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa RAA Wiratanudatar merupakan Bupati pertama yang memimpin wilayah pemerintahan dengan nama Kabupaten Garut.

Pada tanggal 14 Agustus 1925, berdasarkan keputusan Gubernur Jenderal, Kabupaten Garut disahkan sebagai daerah pemerintahan yang berdiri sendiri (otonom). Ini terjadi pada masa pemerintahan RAA Soeria Kartalegawa yang menjadi Bupati ke-5 sejak 1813 atau Bupati ke-2 sejak muncul nama Kabupaten Garut. Oleh karena itu, RAA Soeria Kartalegawa merupakan bupati pertama yang memimpin Kabupaten Garut sebagai daerah otonom.

Pada zaman kolonial Belanda, pergantian bupati yang berlaku di Kabupaten Garut identik dengan yang berlaku di kerajaan-kerajaan kuno Indonesia, yaitu bila Bupati meninggal atau berhenti karena hal tertentu, maka yang berhak menggantikannya adalah putera laki-laki tertua atau menantu laki-laki. Kalau pun tidak demikian, penggantinya masih memiliki hubungan darah atau kekerabatan yang dekat. Dari masa ke masa, tercatat bupati pertama RAA Adiwijaya (1813-1831) digantikan oleh puteranya RAA Kusumadinata (1831-1833) sebagai bupati kedua. Lalu bupati kedua diteruskan oleh menantunya Tumenggung Jayadiningrat

(1833-1871) sebagai bupati yang ketiga. Masih memiliki ikatan kekeluargaan, bupati ketiga digantikan oleh RAA Wiratanudatar (1871-1915) sebagai bupati yang keempat. Selanjutnya bupati keempat digantikan oleh keponakannya Adipati Suria Kartalegawa (1915-1929) yang menjadi bupati kelima. Kemudian ia diteruskan oleh puteranya Adipati Moh. Musa Suria Kartalegawa (1929-1944) sebagai bupati keenam.

Dalam sejarah Garut, tercatat periode Bupati terlama yang memimpin hingga mencapai lebih dari 40 tahun yaitu RAA Wiaratanudatar (1971-1915). Sedikitnya ada tiga orang Bupati yang memimpin kurang dari satu atau dua tahun seperti R. Tumenggung Endung Suriaputra (1944-1945) atau Letkol Akil Ahyar Masyur (1966-1967).

Sejarah juga mencatat, bahwa sejak pemilihan bupati berdasarkan periode waktu, belum terdapat Bupati Garut yang memegang masa jabatan lebih dari satu periode.

Visi Pemerintah Kabupaten Garut 2009-2014 adalah:

“Terwujudnya Garut yang Mandiri dalam Ekonomi, Adil dalam Budaya dan Demokratis dalam Politik dengan Didasari Ridlo Allah SWT”.

Misi Dan Misi Pemerintah Kabupaten Garut 2009-2014 adalah:

- Membangun kualitas sumber daya manusia yang berlandaskan nilai agama, sosial dan budaya sesuai kearifan lokal;
- Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis agrobisnis, agroindustri dan pariwisata disertai pengembangan budaya lokal;

- Meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih;
- Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur wilayah sesuai dengan daya dukung dan fungsi ruang.

3.1.6 Kabupaten Sumedang

Berdasarkan ahli sejarah, runtuhnya kerajaan Padjadjaran pada abad ke 16 erat kaitannya dengan perkembangan kerajaan Sumedang Larang , Kekuasaan Padjadjaran berakhir setelah adanya serangan laskar gabungan dari kerajaan Banten , Pakungwati, Demak dan Angke. Pada waktu itu Sumedang Larang tidak ikut runtuh karena sebagian besar rakyatnya sudah memeluk Agama Islam yang datang dari arah timur, oleh karena itu pula pemegang pemerintahan kerajaan Sumedang Larang waktu itu adalah Pangeran Kusumahdinata yang berkuasa dari tahun 1530-1578, yang lebih dikenal dengan sebutan Pangeran Santri.

Berdasarkan catatan sejarah yang ada, sebelum menjadi Kabupaten Sumedang seperti sekarang ini, telah terjadi beberapa peristiwa penting diantaranya: Pada mulanya kabupaten Sumedang adalah sebuah kerajaan bernama Kerajaan Tembong Agung dengan rajanya bernama Prabu Galuh Hadji Adji Putih (Adji Purwa Sumedang)

Pada masa pemerintahan Prabu Tuntang Buana yang juga dikenal dengan sebutan Prabu Tadjimalela, Kerajaan Tembong Agung berubah nama menjadi kerajaan Sumedang Larang. Kerajaan Sumedang Larang mencapai masa keemasan pada masa pemerintahan Pangeran Angka Widjaya atau dikenal dengan sebutan Prabu Geusan

Ulun. Pada masa pemerintahan Prabu Geusan Ulun inilah diterapkan mulainya Sistem Pemerintahan Kabupaten

Pada tanggal 22 april 1579, Prabu Geusan Ulun dinobatkan menjadi Prabu Sumedang Larang oleh Prabu Siliwangi. Penobatan ini menjadi titik awal berkembangnya Kabupaten Sumedang sebagai sebuah pemerintahan yang memiliki otoritas penuh. Oleh sebab itu Tanggal 22 April ditetapkan menjadi hari jadi Kota Sumedang.

Ibukota kabupaten Sumedang adalah Kota Sumedang, yang memiliki ciri seperti kota-kota kuno khas Jawa Barat yaitu terdapat alun-alun sebagai pusat Kota yang dikelilingi Masjid Agung, penjara dan kantor pusat pemerintahan. Ditengah–tengah alun-alun terdapat Monumen Lingga yaitu tugu peringatan atas jasa-jasa Pangeran Suriatmaja dalam mengembangkan Sumedang. Monumen tersebut dibangun pada tahun 1902 oleh Pemerintahan Belanda dan hingga kini dijadikan lambang kabupaten Sumedang.

Adapun urutan lengkap susunan figur para pimpinan Sumedang yang memegang tampuk Pemerintahan dari dahulu sampai sekarang adalah:

- Pangeran Koesoemahdinata I (Pangeran Santri) dari tahun 1530-1578
- Pangeran Koesoemahdinata II (Pangeran Geusan Ulun) dari tahun 1578-1601
- Pangeran Koesoemahdinata III (Pangeran Rangga Gempol I) dari tahun 1601-1625
- Pangeran Koesoemahdinata IV (Pangeran Rangga Gede) dari tahun 1625-1633
- Raden Bagus Weruh (Pangeran Rangga Gempol II) dari tahun 1633-1656

- Pangeran Koesoemahdinata V (Pangeran Panembahan/Pangeran Rangga Gempol III) dari tahun 1656-1706
- Dalem Adipati Tanoemadja dari tahun 1706-1709
- Raden Tumenggung Koesoemahdinata VII (Pangeran Rangga Gempol IV/Pangeran Karuhun) dari tahun 1709-1744
- Dalem Istri Radjaningrat dari tahun 1744-1759
- Dalem Adipati Koesoemahdinata VIII (Dalem Anom) dari tahun 1759-1761
- Dalem Adipati Soerianagara II dari tahun 1761-1765
- Dalem Adipati Soerialaga dari tahun 1765-1773
- Dalem Adipati Partakoesoemah (Tusschen Bestur Parakanmuncang) dari tahun 1773-1789
- Dalem Aria Satjapati III dari tahun 1789-1791
- Raden Tumenggung Soerianagara (Pangeran Koesoemahdinata IX/Pangeran Kornel) dari tahun 1791-1828
- Dalem Adipati Koesoemahjoeda (Dalem Ageung) dari tahun 1828-1833
- Dalem Adipati Koesoemahdinata (Dalem Alit) dari tahun 1833-1834
- Raden Tumenggung Soeriadilaga dari tahun 1834-1836
- Pangeran Soeria Koesoemah Adinata (Pangeran Sugih) dari tahun 1836-1882
- Pangeran Aria Soeriaatmadja (Pangeran Mekah) dari tahun 1882-1919
- Adipati Aria Koesoemadilaga dari tahun 1919-1937
- Tumenggung Aria Soeria Koesoema Adinata dari tahun 1937-1946

- Tumenggung Hasan Satjakoesoemah dari tahun 1946-1947
- Tumenggung Mohamad Singer dari tahun 1947-1949
- Tumenggung Hasan Satjakoesoemah dari tahun 1949-1950
- Raden Abdoerachman Kartadipoera dari tahun 1951-1958
- Sulaeman Soemitakoesoemah dari tahun 1951-1958
- Tahun 1958-1960
 - a. Antam Sastradipura (Kepala daerah)
 - b. R. Enoh Soeriadikoesoemah (Pj. Bupati)
- Mohamad Chafil dari tahun 1960-1966
- Adang Kartaman dari tahun 1966-1970
- Drs. Supian Iskandar (Pejabat Bupati) dari tahun 1970-1972
- Drs. Supian Iskandar dari tahun 1972-1977
- Drs. Soeyoed (Pejabat Bupati) dari tahun 1977-1978
- Drs. H. Kustandi Abdoerachman dari tahun 1978-1983
- Drs. H. Sutardja dari tahun 1983-1993
- Drs. H. Moch Husein Jachjasaputra dari tahun 1993-1998
- Drs. H. Misbach dari tahun 1998-2003
- H. Don Murdono, S.H,M.Si 2003-sekarang

3.2 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif. Metode penelitian ini disebut metode penelitian kuantitatif karena data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistika (Sugiono, 2017:7).

3.2.1 Operasionalisasi Variabel

Operasionalisasi variabel ini menguraikan atau menjelaskan variabel dari objek penelitian yang akan diteliti, Berdasarkan judul yang dipilih yaitu “Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal”. Maka variabel dalam penelitian ini adalah:

1. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah alokasi belanja modal. Variabel dependen adalah variabel terikat yang di pengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas (Sugiono. 2017 : 39).
2. Variabel independen dalam penelitian ini adalah Kinerja Keuangan Daerah dengan rasio keuangan yang digunakan adalah tingkat kemandirian daerah dan efektivitas PAD. Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi atau yang mejadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (Sugiono, 2017 : 39)

1.2.1.1 Kemandirian Keuangan Daerah

Tingkat Kemandirian adalah tingkat kemandirian keuangan pemerintah daerah. Tingkat kemandirian dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi serta pinjman daerah.

$$\text{Kemandirian Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Transfer Pusat} + \text{Provinsi} + \text{Pinjaman}} \times 100\%$$

1.2.1.2 Tingkat Efektifitas Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Tingkat Efektifitas PAD adalah kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan, dihitung dengan membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD (dianggarkan).

$$\text{Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

1.2.1.3 Alokasi Belanja Modal

Alokasi belanja adalah alokasi untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya dalam satu periode akuntansi. Alokasi belanja modal ini merupakan perbandingan antara total realisasi belanja modal dengan dengan total belanja daerah.

$$\text{Alokasi Belanja Modal} = \frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}}$$

Tabel 3.2
Oprasionalisasi Variabel

No	Variabel	Definisi Variabel	Indikator	Skala
1	Kemandirian Keuangan Daerah (X1)	Tingkat Kemandirian adalah tingkat kemandirian keuangan pemerintah daerah. Tingkat kemandirian dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman daerah (Mahmudi, 2016:140)	<ul style="list-style-type: none"> - Pendapatan Asli Daerah (PAD) - Transfer Pusat - Transfer Provinsi - Pinjaman Daerah $\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Transfer Pusat} + \text{Provinsi} + \text{Pinjaman}} \times 100\%$	Rasio
2	Efektifitas Pendapatan Asli Daerah (X2)	Tingkat Efektifitas PAD adalah kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang di targetkan, dihitung dengan membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD (dianggarkan) (Mahmudi, 2016:141)	<ul style="list-style-type: none"> - Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) - Target Penerimaan Pendapatan Asli Daerah $\frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$	Rasio
3	Alokasi Belanja Modal (Y)	Alokasi belanja modal ini merupakan perbandingan antara total realisasi belanja modal dengan total belanja daerah (Mahmudi, 2016:162)	<ul style="list-style-type: none"> -Realisasi Belanja modal -Total Belanja Daerah $\frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}}$	Rasio

3.2.2 Teknik Pengumpulan Data

3.2.2.1 Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel yaitu data yang memiliki dimensi ruang dan waktu, yang merupakan gabungan antara data silang (*cross section*) dengan data runtut waktu (*time series*). Adapun sumber data yang dipergunakan berasal dari data sekunder. Data sekunder yaitu data yang tidak secara langsung diberikan kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen dan catatan-catatan (Sugiyono, 2012:187). Dalam penelitian ini data yang digunakan bersumber dari Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DJPk).

3.2.2.2 Populasi Sasaran

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono: 2017:215). Populasi dalam penelitian ini adalah daerah Kabupaten/Kota Periangna Timur tahun 2008-2017.

3.2.2.3 Prosedur Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang di perlukan dalam penelitian ini, penulis melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Studi kepustakaan yaitu yaitu dengan membaca literatur-literatur bidang ekonomi dan akuntansi yang digunakan sebagai landasan kerangka berpikir dan teori-teori yang sesuai dengan penelitian.

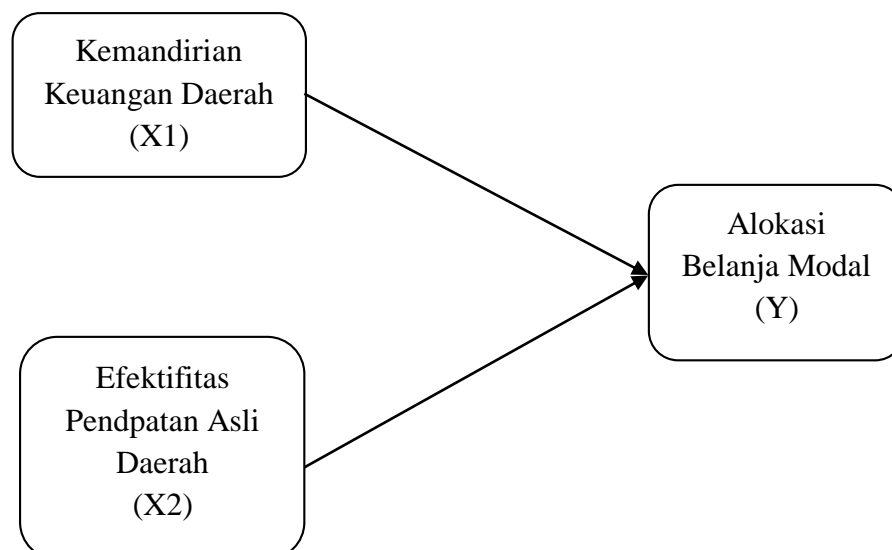
2. Penelitian dokumenter yaitu dengan cara menelaah dan menganalisis laporan-laporan yang berkaitan dengan Akuntansi Sektor Publik dan Laporan Keuangan Daerah yang telah diterbitkan oleh Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DJPk) melalui www.djpk.kemenke.go.id.

3.3 Model Penelitian

Dalam penelitian ini terdiri dari variabel independen (variabel bebas) dan variabel dependen (variabel terikat). Yang menjadi variabel independen adalah Kemandirian Keuangan Daerah (X_1), Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (X_2) yang menjadi variabel dependen adalah Alokasi Belanja Modal (Y).

Sesuai dengan judul penelitian yaitu “Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah dan Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal”, maka model/paradigma penelitian yang digunakan dalam penelitian ini tercermin pada gambar sebagai berikut:

Gambar 3.1
Model/Paradigma Penelitian



Keterangan:

X_1 = Kemandirian Keuangan Daerah

X_2 = Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Y = Alokasi Belanja Modal

3.4 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data yang dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain. (Sugiyono, 2017:244). Kegiatan dalam analisis data adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah dan melakukan perhitungan untuk menjawab masalah, dan menguji hipotesis yang telah diajukan.

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif adalah analisis yang menggunakan rumus-rumus statistik yang disesuaikan dengan judul penelitian dan rumusan masalah, dengan tujuan untuk menghitung angka-angka dalam rangka menganalisis data yang dipeoleh (Sugiyono, 2017:243).

3.4.1 Analisis Statistik

Untuk menguji analisis yang digunakan, maka dilakukan pengujian pengujian secara korelasional untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh dan seberapa besar pengaruh dari Kemandirian Keuangan Daerah dan Efektifitas Pendapatan Asli Daerah terhadap Alokasi Belanja Modal.

3.4.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan untuk menguji apakah model regresi benar-benar menunjukkan pengaruh atau hubungan yang signifikan dan representatif. Pengujian ini dilakukan menggunakan program Eviews 9. Berikut ini beberapa pengujian dalam uji asumsi klasik.

3.4.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel dependen, variabel independen atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data yang normal atau mendekati normal. Uji normalitas data dapat dilihat dari penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal pada grafik *Normal Probability Plot* atau dengan melihat histogram dari residualnya. Uji normalitas dengan grafik Normal P-P Plot akan membentuk satu garis lurus diagonal, kemudian plotting data akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi normal maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya.

Selain itu untuk menguji normalitas data, dapat digunakan uji dalam tabel *Test of Normality*. Bila nilai signifikan $< 0,005$ berarti distribusi data tidak normal, sebaliknya apabila nilai signifikan $> 0,005$ maka berarti distribusi normal.

3.4.2.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Pada model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas. Jika variabel bebas saling berkorelasi, maka variabel ini tidak orthogonal. Variabel orthogonal adalah variabel bebas yang nilai korelasi antara variabel bebasnya sama dengan nol. Multikolinieritas dapat diketahui dari uji matriks korelasi. Dasar pengambilan keputusan sebagai berikut:

H₀ : Jika nilai korelasi berada $-0,8$ dan $0,8$, berarti tidak terjadi multikolinearitas.

H₁ : Jika nilai korelasi $\leq -0,8$ atau $\geq 0,8$, berarti terjadi multikolinearitas.

3.4.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain, jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain berbeda maka disebut heteroskedastisitas. Dasar pengambilan keputusan sebagai berikut:

H₀ : Jika seluruh nilai probabilitas semua variabel $> 0,05$ berarti tidak terjadi heteroskedastisitas.

H₁ : Jika seluruh nilai probabilitas semua variabel $< 0,05$ berarti terjadi heteroskedastisitas.

3.4.2.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada masalah autokorelasi (Ghozali, 2013). Untuk mendeteksi adanya autokorelasi dalam penelitian ini digunakan uji *Durbin-Watson*.

Untuk menguji ada atau tidaknya autokorelasi maka dilakukan pengujian *Durbin-Watson* (DW) dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Bilai nilai DW terletak antara batas atas (d_u) dan $(4-d_u)$, maka koefisien autokorelasi sama dengan nol berarti tidak ada autokorelasi.
2. Bila nilai DW lebih rendah dari pada batas bawah (d_l), maka koefisien autokorelasi lebih dari nol berarti ada autokorelasi positif.
3. Bila nilai DW lebih dari pada $(4-d_l)$, maka koefisien autokorelasi lebih kecil dari nol berarti ada autokorelasi negatif.
4. Bila nilai DW terletak antara batas atas (d_u) dan batas bawah (d_l) atau dw terletak antara $(4-d_u)$ dan d_l , maka hasilnya tidak dapat disimpulkan.

3.4.3 Analisis Regresi Data Panel

Analisis regresi data panel digunakan pada penelitian ini untuk memprediksi hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Alat bantu analisis yang digunakan, yaitu Eviews 9. Hubungan antara variabel independen, yaitu Kemandirian Keuangna Daerah (X1), dan Efektifitas Pendapatan Asli Daerah (X2)

terhadap Alokasi Belanja Modal (Y) diukur dengan rumus persamaannya sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + e_{it}$$

Dimana:

- Y = Alokasi Belanja Modal
- β_0 = Konstanta
- $\beta_1 - \beta_4$ = Koefisien regresi variabel independen
- X_1 = Kemandirian Keuangan Daerah
- X_2 = Efektifitas Pendapatan Asli Daerah
- e = *Term of error*
- i = Daerah Kabupaten/Kota
- t = Waktu

Dalam mengaplikasikan data panel, dapat menggunakan metode regresi data panel. Secara umum model regresi data panel dapat dilakukan dalam tiga pemodelan, yaitu:

3.4.3.1 *Command Effect Model (CEM)*

Teknik yang paling sederhana untuk mengestimasi data panel adalah hanya dengan mengkombinasikan data *time series* dan *cross section*. Dengan hanya menggabungkan data tersebut tanpa melihat perbedaan antarwaktu dan individu maka metode yang digunakan yaitu dengan metode OLS untuk mengestimasi model data panel. *Common Effect Model* dinyatakan dalam model sebagai berikut:

$$Y_{it} = a + \beta_j X_{jit} + e_{it}$$

Keterangan:

- Y_{it} : Variabel terikat pada waktu t untuk unit *cross section* i
- a : *Intercept*
- β_j : Parameter untuk variabel ke- j
- X_{jit} : Variabel bebas j di waktu t untuk unit *cross section* i
- e_{it} : Komponen *error* di waktu t untuk unit *cross section* i
- i : Urutan perusahaan yang diobservasi
- t : *Time series* (urutan waktu)
- j : Urutan variabel

3.4.3.2 *Fixed Effect Model* (FEM)

Model ini mengasumsikan adanya perbedaan intersep didalam perusahaan. Intersep ini mungkin akan berubah setiap individu dan waktu. *Fixed Effect Model* dengan teknik variabel *dummy* dapat ditulis sebagai berikut:

$$Y_{it} = a + \beta_j X_{jit} + \sum_{i=2}^n a_i D_i + e_{it}$$

Keterangan:

- Y_{it} : Variabel dependen pada waktu t untuk unit *cross section* i
- a : *Intercept*
- β_j : Parameter untuk variabel ke- j
- X_{jit} : Variabel bebas j di waktu t untuk unit *cross section* i
- e_{it} : Komponen *error* di waktu t untuk unit *cross section* i
- D_i : Variabel *dummy*

3.4.3.3 *Random Effect Model (REM)*

Model ini akan mengestimasi data panel dimana variabel gangguan (*error terms*) mungkin saling berhubungan antar waktu dan antar individu. Model ini juga disebut dengan *Error Component Model (ECM)*. Dalam teknik metode *Ordinary Least Square (OLS)* tidak bisa digunakan untuk mendapatkan estimator yang efisien bagi model *random effect*. Sehingga metode yang tepat untuk mengestimasi adalah *Generalized Least Square (GLS)* dengan asumsi homokedastisitas dan tidak ada *cross sectional correlation*. Untuk mengatasi kelemahan model ini maka menggunakan *dummy* variabel sehingga dapat ditulis dengan persamaan sebagai berikut:

$$Y_{it} = a + \beta_j X_{jit} + e_{it}$$

$$e_{it} = u_{it} + v_{it} + w_{it}$$

Keterangan:

u_{it} : Komponen *cross section error*

v_{it} : Komponen *time series error*

w_{it} : Komponen *error gabungan*

3.4.4 **Pemilihan Teknik Estimasi Data Panel**

Terdapat beberapa pengujian yang dapat dilakukan untuk memilih metode mana yang paling tepat digunakan dalam mengelola data panel yaitu:

3.4.4.1 *Uji Chow*

Penentuan model estimasi antara *Common Effect Model (CEM)* dan *Fixed Effect Model (FEM)* dengan Uji Chow. Dengan kriteria pengujian:

H_0 : Model CEM lebih baik dibandingkan model FEM.

H_1 : Model FEM lebih baik dibandingkan model CEM.

Jika p -value < nilai signifikan (0,05) maka H_0 ditolak (H_1 diterima).

3.4.4.2 Uji Hausman

Penentuan model estimasi antara *Fixed Effect Model* (FEM) dan *Random Effect Model* (REM) dengan Uji Hausman. Dengan kriteria pengujian:

H_0 : Model REM lebih baik dibandingkan model FEM.

H_1 : Model FEM lebih baik dibandingkan model REM.

Jika p -value < nilai signifikan (0,05) maka H_0 ditolak (H_1 diterima).

3.4.4.3 Uji Lagrange Multiplier

Penentuan model estimasi antara *Common Effect Model* (CEM) dan *Random Effect Model* (REM) dengan Uji Lagrange Multiplier. Dengan kriteria pengujian:

H_0 : Model CEM lebih baik dibandingkan model REM.

H_1 : Model REM lebih baik dibandingkan model CEM.

Jika p -value < nilai signifikan (0,05) maka H_0 ditolak (H_1 diterima).

3.4.5 Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan analisis regresi data panel. Untuk ketepatan perhitungan sekaligus mengurangi *human error*, peneliti menggunakan komputer pengolahan data statistik yaitu program Eviews 9 untuk memperoleh hasil yang tepat, akurat, juga cepat.

3.4.5.1 Uji Koefisien Determinan (R^2)

Uji koefisien Determinan (R^2) bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel-variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Bila terdapat nilai *adjusted* R^2 bernilai negatif, maka nilai *adjusted* R^2 dianggap bernilai nol. Untuk menjelaskan cara memperoleh koefisien determinasi dapat dituliskan melalui beberapa persamaan dibawah ini:

Koefisien Determinasi: $r^2 \times 100\%$

Koefisien non Determinasi: $(1-r^2) \times 100\%$

Dimana r merupakan persamaan koefisien korelasi yang dapat dicari dengan menggunakan rumus korelasi sebagai berikut:

$$r = \frac{\sum_{n=1} (X_1 - \bar{X})(Y_1 - \bar{Y})}{\sqrt{[\sum_{n=1} (X_1 - \bar{X})^2][\sum_{n=1} (Y_1 - \bar{Y})^2]}}$$

Dengan kriteria:

$R^2 = 0$, apabila nilai koefisien determinasi dalam model regresi semakin kecil (mendekati nol) berarti semakin kecil pengaruh semua variabel independen terhadap variabel dependen.

$R^2 = 1$, apabila nilai koefisien determinasi semakin mendekati 100% berarti semua variabel independen dalam model regresi memberikan hampir semua informasi

yang diperlukan untuk memprediksi variabel dependennya atau semakin besar pengaruh semua pengaruh independen terhadap variabel dependen.

3.4.5.2 Uji Signifikansi Secara Simultan (Uji F)

Uji F atau dikenal dengan uji serentak dengan tingkat signifikansi tertentu digunakan untuk mengetahui kekuatan prediksi secara bersama-sama (simultan) dari variabel X terhadap variabel Y (Silalahi, 2015:594). Uji F bertujuan untuk mengetahui pengaruh semua variabel bebas yang terdapat didalam model secara simultan terhadap variabel terikat. Pengujian hipotesis untuk Uji F adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan hipotesis, secara simultan Kemandirain Keuangan Daerah dan Efektifitas PAD berpengaruh terhadap Harga Saham.
2. Menentukan tingkat signifikansi, hipotesis ini diuji dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar 5%.
3. Menentukan kriteria pengujian hipotesis:
 - a. Jika F signifikansi $<0,05$, artinya secara simultan Kemandirian Keuangan Daerah dan Efektifitas Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal.
 - b. Jika F signifikansi $>0,05$, artinya secara simultan Kemandirian Keuangan Daerah dan Efektifitas Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif tidak signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal.

3.4.5.3 Uji Signifikansi Secara Parsial (Uji t)

Uji t atau dikenal dengan uji parsial digunakan untuk menguji prediksi secara parsial dari tiap variabel independen terhadap variabel dependen (Silalahi, 2015:594). Pengujian ini berasumsi bahwa variabel lain dianggap konstan. Uji t menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel terkait. Hasil uji t tingkat signifikansi tertentu dapat dilihat pada tabel *coefficients* pada kolom sig.

Prediksi variabel independen terhadap variabel dependen akan diketahui apabila jumlah *degree of freedom* (df) adaah 20 atau lebih, dan derajat kepercayaannya sebesar 5%. H_0 dapat ditolak bila nilai t lebih besar dari 2. Uji ini dilakukan dengan membandingkan nilai statistik t dengan titik kritis menurut tabel. Apabila nilai statistik t hasil perhitungan lebih tinggi dibandingkan nilai t tabel, maka hipotesis alternatif diterima. Langkah yang dilakukan dalam melakukan Uji t adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan hipotesis operasional

Uji t memerlukan perumusan hipotesis nol (H_0) dan hipotesis alternatif (H_1).

Hipotesis nol dan hipotesis alternatif daam uji t dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah terhadap Alokasi Belanja Modal

$H_{01} : \beta_1=0$, artinya Kemandirian Keuangan Daerah berpengaruh positif tidak signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal.

$H_{a1} : \beta_1 \neq 0$, artinya Kemandirian Keuangan Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal.

b. Pengaruh Efektifitas Pendapatan Asli Daerah terhadap Alokasi Belanja Modal.

$H_{02} : \beta_2 = 0$, artinya Efektifitas Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif tidak signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal.

$H_{a2} : \beta_2 \neq 0$, artinya Efektifitas Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal.

2. Menentukan tingkat signifikansi, hipotesis ini diuji dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar 5%.

3. Menentukan kriteria pengujian hipotesis:

a. Jika t signifikansi $< 0,05$, artinya secara parsial Kemandirian Keuangan Daerah dan Efektifitas Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Alokasi Belanja modal.

b. Jika t signifikansi $> 0,05$, artinya secara parsial Kemandirian Keuangan Daerah dan Efektifitas Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif tidak signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal.

3.4.5.4 Penarikan Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian seperti tahapan diatas maka akan dilakukan analisis secara kuantitatif. Dari hasil tersebut akan ditarik kesimpulan apakah hipotesis yang ditetapkan diterima atau ditolak.

